

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arab Saudi adalah negara yang diperintah oleh seorang raja, dan sistem pemerintahannya adalah monarki absolut. Monarki berasal dari bahasa Yunani “monos” yang berarti satu, dan “archein” yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa (Nina Karina Setyo Andayani, 2013). Artinya, raja memiliki kekuasaan tertinggi dan berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kawasan Arab Saudi yang terletak di tengah-tengah Jazirah Arab memiliki posisi strategis yang penting karena dapat diakses melalui laut, darat, dan udara. Selain itu, wilayah Arab Saudi juga berada di antara dua rute pelayaran utama di dunia, yakni jalur laut yang menghubungkan Laut Merah dengan Terusan Suez dan Laut Persia (Kartini, 2020). Sejak pendirian negara pada tahun 1932, Arab Saudi telah diperintah oleh keluarga Saud, yang merupakan keluarga kerajaan yang mendukung gerakan Wahabi. Keluarga Saud dan kelompok ulama Wahabi memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan negara dan dalam pembuatan kebijakan.

Sifat pemerintahan Arab Saudi cenderung memiliki ciri-ciri oligarki, terutama terlihat dalam komposisi kabinet pemerintahan yang cenderung didominasi oleh anggota keluarga kerajaan. Akibatnya, segala wewenang dalam membuat kebijakan di Arab Saudi berada di tangan keluarga kerajaan. Oleh karena itu, masyarakat Arab Saudi umumnya cenderung menerima apa yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sistem ini sangat terkait dengan budaya masyarakat Arab Saudi yang cenderung menghargai pemimpin yang dianggap terhormat di tengah-tengah mereka. Dengan negara yang diwarisi oleh satu keluarga, keluarga kerajaan memiliki kekuasaan yang istimewa, yang memudahkan pemerintah dalam mengendalikan berbagai sektor di Arab Saudi. Hal ini memungkinkan pemerintah Arab Saudi untuk mencapai tujuannya sesuai dengan kehendak mereka. Di sisi lain, situasi ini dapat membuat masyarakat Arab Saudi merasa memiliki keterbatasan dalam berinovasi dan harus tunduk pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Roji, 2017).

Arab Saudi sebagai sebuah negara yang merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah dalam konstitusinya (Pasal 1), negara ini menghadapi implikasi dari kehadiran aliran pemikiran Wahhabi

dan ulama-ulama yang menganut aliran ini dalam struktur pemerintahannya. Keterlibatan kelompok Wahhabi dan ulama-ulama ini dalam pemerintahan Arab Saudi tidak bisa diabaikan karena sejarah mereka menunjukkan peran yang signifikan dalam pembentukan negara ini (Izaqi, 2016). Arab Saudi dan kelompok Wahhabi telah memiliki hubungan yang kuat dan saling bergantung satu sama lain selama bertahun-tahun. Keterkaitan ini memengaruhi dinamika Arab Saudi sebagai negara. Sejak masa pemerintahan Raja Abdul Aziz hingga sekarang, kelompok Wahhabi telah menjadi pemangku kepentingan utama dalam negara. Dan sebaliknya, penguasa Arab Saudi juga memperhatikan kepentingan kelompok Wahhabi. Kelompok Wahhabi memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan hukum negara. Keterkaitan yang kuat antara Arab Saudi dan kelompok Wahhabi memungkinkan penghambatan terhadap upaya reformasi yang mungkin ingin dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi.

Pada tahun 2017, Arab Saudi mengalami perubahan besar dalam kepemimpinan negara ketika Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud mengumumkan bahwa putranya, Muhammad bin Salman, akan diangkat sebagai Putra Mahkota (CNN Indonesia , 2022). Kemudian, pada tahun 2022, Raja Salman menunjuk Muhammad bin Salman sebagai perdana menteri Arab Saudi (CNBC Indonesia , 2022). Langkah ini menciptakan ketidakpastian dalam politik dan tata kelola negara karena Muhammad bin Salman dikenal sebagai tokoh yang ambisius dan kontroversial. Sebelum Muhammad bin Salman diangkat sebagai perdana menteri, Arab Saudi telah dikenal dengan sistem pemerintahan monarki absolut, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi. Pengangkatan seorang perdana menteri dengan kekuasaan yang signifikan adalah perubahan dramatis dalam sistem pemerintahan. Masalah utama terkait dengan diangkatnya Muhammad bin Salman sebagai perdana menteri adalah bagaimana masa depan kepemimpinan di Arab Saudi akan berkembang. Pengangkatan Muhammad bin Salman sebagai perdana menteri juga mencerminkan perubahan politik dalam lingkup keluarga kerajaan Saudi. Perpindahan kekuasaan ini menggambarkan dinamika kuasa antara anggota keluarga kerajaan yang mungkin telah menimbulkan ketegangan internal.

Raja Salman menunjuk Muhammad bin Salman sebagai Putra Mahkota setelah mencopot Muhammad bin Nayef, keponakannya sendiri, dari jabatan tersebut (Al-Jazeera, 2020). Terdapat perbedaan pemikiran antara Muhammad bin Salman dengan penguasa sebelumnya, khususnya dalam hal pemikiran yang lebih terbuka. Hal ini memungkinkan Muhammad bin Salman memiliki

kesempatan untuk mengadopsi pendekatan yang berbeda dari pandangan konservatif yang biasanya dipegang oleh penguasa Arab Saudi sebelumnya. Sebaliknya, Muhammad bin Salman menunjukkan visi yang terbuka dan visioner, sehingga kesempatan ini dijadikan sebagai pijakan untuk mengubah kerajaan menuju arah Islam yang lebih moderat (Haryadi, 2018). Muhammad bin Salman menerima penghargaan dari Forbes Middle East atas perannya dalam mendirikan dan memimpin organisasi MiSK. Organisasi ini berfokus pada pengembangan dan kemajuan kepemimpinan generasi muda Arab Saudi di berbagai bidang, seperti sains, bisnis, dan budaya. Berdasarkan pengalamannya tersebut, Muhammad bin Salman bertekad untuk mendorong reformasi budaya dengan mengakui potensi kerajaan yang melampaui sumber daya alam, mencakup juga sumber daya manusia.

Dalam beberapa tahun terakhir sejak 2017, Pemerintah Arab Saudi telah berusaha mengubah pandangan politik dan sosial negara dengan memperkenalkan sejumlah kebijakan modern. Salah satu kebijakan utama adalah Vision 2030, sebuah program yang diinisiasi oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman pada tahun 2016. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada minyak dan menciptakan ekonomi yang lebih beragam serta lebih terbuka terhadap dunia internasional. Namun, kebijakan-kebijakan modern ini sering kali berbenturan dengan pandangan konservatif para ulama, yang menolak perubahan tersebut karena dianggap mengancam nilai-nilai Islam dan tradisi budaya Arab (Rohman, Ahrori, & Pangastuti, 2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat pada tulisan ini adalah: **Mengapa Muhammad bin Salman Melakukan Reformasi Kebudayaan di Arab Saudi dalam bingkai Saudi Vision 2030?**

C. Kerangka Pemikiran

Teori Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah salah satu bidang studi dalam ilmu Hubungan Internasional. Studi ini bersifat kompleks karena mencakup aspek-aspek eksternal dan internal suatu negara (Rosenau, Thompson, Kenneth, & Boyd, 1976). Negara, sebagai entitas utama dalam sistem hubungan internasional, dianggap sebagai aktor kunci dalam melakukan politik luar negeri, walaupun

terdapat juga aktor-aktor non-negara lain yang turut berperan dalam konteks hubungan internasional.

Dalam analisis politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan internal dipandang sebagai input yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Para pengambil keputusan memproses rangsangan ini melalui suatu proses konversi, di mana input tersebut diubah menjadi output. Proses konversi dalam perumusan kebijakan luar negeri merujuk pada interpretasi situasi, baik yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal, dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dan sumber daya serta kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut (Rosenau, *The Scientific Study of Foreign Policy*, 1980).

Secara umum, beberapa faktor internal yang memengaruhi politik luar negeri suatu negara meliputi faktor historis, geografis, demografis, sistem politik, pandangan aktor politik terhadap sistem internasional, serta kepentingan dan peran yang dikehendaki oleh negara tersebut (Triwahyuni, 2010). Namun, lebih dari itu, sistem pemerintahan, kondisi wilayah, tujuan nasional, kepentingan nasional, dan ideologi bangsa juga turut memengaruhi politik luar negeri. Pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan juga berpengaruh terhadap politik luar negeri, karena setiap pemimpin memiliki kebijakan dan tujuan nasional sendiri terhadap politik luar negeri. Di sisi eksternal, faktor yang memengaruhi politik luar negeri termasuk globalisasi. Dengan kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang pesat, masyarakat dan pemerintah lebih mudah untuk memantau peristiwa-peristiwa di negara lain.

Dalam memahami politik luar negeri, konsep dasar yang perlu diketahui adalah bahwa pada dasarnya politik luar negeri merupakan "teori tindakan" atau kebijakan suatu negara yang diarahkan ke negara lain untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan serangkaian nilai, sikap, arah, dan tujuan yang dirumuskan untuk melindungi, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional dalam arena dunia internasional. Ini merupakan komitmen strategis yang menentukan keterlibatan suatu negara dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya, sekaligus mencapai tujuan dalam konteks domestik maupun internasional (Yani, n.d.).

Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, terdapat sumber-sumber kunci yang menjadi dasar politik luar negeri. James N. Rosenau mengelompokkan faktor-faktor atau sumber-sumber politik luar negeri melalui dua dimensi, yakni dengan menempatkan mereka dalam dimensi waktu (*time*

continuum) dan dimensi agresi sistematis (*systemic aggregation continuum*) (Rosenau, Thompson, Kenneth, & Boyd, 1976). Dimensi waktu mencakup sumber-sumber yang cenderung bersifat stabil dan berlaku secara terus menerus (*sources that tend to change slowly*), sumber-sumber yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi jarak pendek (*short-term fluctuations*), dan sumber-sumber yang cenderung mengalami perubahan cepat (*sources that tend to undergo rapid change*).

Sumber-sumber utama yang menjadi masukan dalam perumusan kebijakan luar negeri meliputi:

1. Sumber Sistemik (*Systemic Sources*): merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara, seperti hubungan antar negara, aliansi, dan faktor situasional eksternal berupa isu-isu lainnya. Faktor situasional eksternal mengacu pada stimulus tiba-tiba yang timbul dari keadaan internasional saat ini.
2. Sumber Masyarakat (*Societal Sources*): merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal suatu negara, seperti budaya, sejarah, ekonomi, struktur sosial, dan juga opini publik.
3. Sumber Pemerintah (*Governmental Sources*): merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal yang menjelaskan pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintah.
4. Sumber Idiosinkratik (*Idiosyncratic Sources*): merupakan sumber yang berasal dari internal dan melibatkan nilai-nilai, pengalaman, bakat, serta kepribadian elit politik memengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri (Rosenau, Thompson, Kenneth, & Boyd, 1976).

Konsep Reformasi Kebudayaan

Reformasi dapat diartikan sebagai perbaikan atau perubahan bentuk (Hidayat, 2007). Selain itu, reformasi juga meliputi usaha-usaha yang disengaja, direncanakan, dan terprogram untuk mengubah "struktur" atau bentuk suatu entitas agar menjadi lebih baik, atau mengembalikannya ke bentuk semula karena alasan-alasan tertentu. Contohnya, reformasi dijalankan ketika struktur yang ada dianggap telah menyimpang dari bentuk semula dan perubahan diperlukan untuk memperbaiki keadaan tersebut.

Kebudayaan adalah bagian yang hidup dan bawaan dari jiwa suatu bangsa, yang seharusnya menjadi kebanggaan yang dirasakan dan dibagikan oleh seluruh individu yang tergabung dalam bangsa tersebut. Kebudayaan hadir sebagai sesuatu yang perlu dijaga dan diwariskan bersama, serta berfungsi sebagai pengikat yang menyatukan.

Fenomena ini berasal dari kenyataan bahwa budaya mencerminkan prinsip-prinsip hidup yang berkembang di dalam suatu masyarakat. Budaya bisa diartikan sebagai totalitas pengetahuan manusia sebagai bagian dari komunitas sosial, digunakan untuk memahami dunia di sekitarnya dan pengalaman hidupnya, serta menjadi fondasi dari perilaku individu. Oleh karena itu, kebudayaan adalah sekumpulan aturan, pedoman, rencana, dan strategi yang terdiri dari beragam model kognitif yang dimiliki oleh manusia dan digunakan secara selektif dalam interaksinya dengan lingkungannya, dan tercermin dalam tingkah laku individu (Maryana, 2019).

Sehingga, Konsep reformasi kebudayaan mencakup serangkaian upaya untuk mengubah atau memperbaiki nilai-nilai, norma, kepercayaan, praktik, dan institusi budaya dalam suatu masyarakat atau organisasi. Ide dasar di balik reformasi budaya adalah untuk menciptakan perubahan yang positif dalam budaya yang ada, dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan, mempromosikan kemajuan sosial, ekonomi, atau politik, dan mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting. Reformasi kebudayaan sering kali dihadapkan dengan proses yang kompleks dan berkelanjutan, memerlukan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak yang terlibat. Ini juga dapat menimbulkan resistensi atau konflik dari mereka yang menentang perubahan. Konsep reformasi kebudayaan mengacu pada upaya yang berkelanjutan dan serius untuk menciptakan perubahan yang positif dalam budaya yang ada, dengan tujuan menciptakan masyarakat atau organisasi yang lebih baik dan lebih adaptif terhadap perubahan zaman (Maryana, 2019).

Dari penjelasan tersebut, reformasi kebudayaan dalam kerangka Saudi Vision 2030 yang diprakarsai oleh Muhammad bin Salman adalah bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk membentuk citra Arab Saudi yang lebih terbuka daripada sebelumnya. Melihat tujuan dari Saudi Vision 2030 yakni mencapai kesejahteraan ekonomi melalui sektor non-minyak dan gas (Syaputra & Prasodjo, 2023), maka Arab Saudi ingin mengurangi ketergantungan ekonominya pada minyak bumi yang rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Melalui Saudi Vision 2030, negara tersebut berusaha untuk mendiversifikasi perekonomiannya dengan mengembangkan sektor-sektor non-minyak yang salah satunya adalah kebudayaan. Sehingga untuk mencapai

kesejahteraan ekonomi tersebut, kebijakan reformasi kebudayaan melalui Saudi Vision 2030 menjadi cara Muhammad bin Salman untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Reformasi tersebut meliputi pembukaan bioskop, konser musik, perizinan wanita mengemudi, diperbolehkannya wanita menonton sepak bola di lapangan, dan pembangunan Kota Neom yang bernuansa futuristik.

Konsep Idiosinkratik

Penelitian ini mengadopsi analisis pada tingkat individu, dengan menggunakan konsep idiosinkratis dalam menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh Muhammad Bin Salman. Idiosinkratis merujuk pada karakteristik atau kepribadian khusus, sering kali diidentifikasi sebagai gaya kepemimpinan unik yang dimiliki oleh seorang pemimpin (Tiosstar, Rosyidin, & Hanura, 2021). Konsep idiosinkratik mengacu pada sifat-sifat, kecenderungan, dan karakteristik yang unik pada individu tertentu. Ini mencakup kombinasi faktor-faktor seperti kebiasaan, preferensi, sikap, dan respon individu terhadap lingkungannya. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu memiliki perbedaan yang signifikan dalam cara mereka bereaksi terhadap situasi, menjalin hubungan, serta cara mereka memahami dunia. Konsep ini menyoroti bahwa tidak ada dua orang yang sama persis, dan perbedaan-perbedaan ini merupakan bagian penting dari identitas individu. Istilah idiosinkratik berasal dari bidang psikologi dan mengacu pada karakteristik unik dalam perilaku seseorang yang dapat memengaruhi cara hidup sehari-harinya. Konsep ini menyoroti keyakinan bahwa sifat kepribadian individu dapat berpengaruh pada kebijakan atau politik suatu negara.

Karakter seseorang terbentuk dari kesadaran diri dan juga dari perasaan yang tidak selalu disadari, yang berkembang dari pengalaman pribadi individu tersebut (WAYNE, 2011). Dengan demikian, karakter seseorang paling jelas terlihat saat mereka membuat keputusan. Perilaku seseorang sering kali didasarkan pada keputusan yang mereka ambil. Dalam konteks kepemimpinan negara, karakter seorang pemimpin akan memengaruhi tindakan dan keputusan yang diambilnya. Menurut Hermann, karakter seorang pemimpin bisa tercermin dari gaya pengambilan keputusan dan cara mereka berinteraksi, tidak peduli di mana pun mereka berada. Cara seorang pemimpin membuat keputusan dan berhubungan dengan orang lain dalam konteks politik akan tercermin dalam perilaku politiknya (Hermann, 1980).

Dalam konsep idiosinkratis, model analisis ini menekankan dampak individu dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, yang dikenal dengan istilah persepsi elit. Ini

merujuk pada karakteristik yang melekat pada seseorang, khususnya pemimpin atau tokoh utama. Konsep ini dianggap sebagai landasan analisis yang mendasar namun krusial karena cara sistem internasional, negara, dan masyarakat terbentuk sangat dipengaruhi oleh individu yang membangunnya. Secara umum, idiosinkratis mengacu pada faktor-faktor seperti nilai, keterampilan, dan pengalaman sebelumnya yang dimiliki oleh pembuat keputusan, yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang dijalankan oleh mereka.

Oleh karena itu, kepribadian atau karakter seorang pemimpin sangat berpengaruh saat terlibat dalam kebijakan luar negeri. Kurangnya minat atau keterlibatan seorang pemimpin dalam hal ini bisa menandakan kecenderungan otoriter. Ketika seorang pemimpin bersifat otoriter, mereka cenderung mendelegasikan sebagian besar tanggung jawab kepada bawahannya, sehingga karakteristik mereka menjadi lebih sulit diidentifikasi (M.Hudson & Benjamin, 2020).

Disamping itu, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi idiosinkratis seorang pemimpin menurut (Anugerah, 2016) meliputi:

1. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah latar belakang keluarga, yang mencakup status sosial, keadaan ekonomi keluarga, dan interaksi sosial dengan masyarakat sekitarnya.
2. Aspek berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah latar belakang pendidikan. Ini mencakup institusi pendidikan yang dihadiri oleh seorang pemimpin, mulai dari sekolah dasar hingga jenjang pendidikan tertinggi yang mereka capai. Pendidikan di sini tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga aspek pendidikan informal.
3. Aspek ketiga mencakup pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh oleh seorang pemimpin melalui perjalanan kehidupannya, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, yang dipengaruhi oleh dinamika sosial yang dialaminya.
4. Aspek keempat melibatkan afiliasi dengan elit atau kelompok pemimpin. Dalam konteks sistem politik di mana partai politik memiliki peran penting dalam demokrasi, persepsi seorang elit sering kali dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan yang diwakili oleh partai politik yang mereka dukung.

5. Aspek selanjutnya adalah produksi pengetahuan. Dalam konteks ini, produksi pengetahuan berkaitan dengan latar belakang sosial dan pendidikan seorang pemimpin, namun lebih khusus mengacu pada bagaimana pemimpin tersebut mengintegrasikan pengetahuan menjadi persepsi, pola pikir, dan sudut pandang untuk memahami suatu masalah.

Mengacu pada penjelasan tersebut, karakteristik seseorang dapat dilihat dari kebijakan yang ia buat. Pemimpin yang memiliki perilaku tertentu akan memengaruhi tindakan dan keputusan yang diambilnya. Karakteristik Muhammad bin Salman yang dominan dan ambisius disebabkan oleh beberapa aspek yang memengaruhi idiosinkratik seseorang seperti latar belakang pendidikan, Pengalaman dari dinamika kehidupan sosialnya, dan produksi pengetahuan. Sehingga menghasilkan kebijakan yang ia buat yakni Saudi Vision 2030 yang salah satu isinya adalah reformasi kebudayaan.

D. Hipotesis

Implementasi kebijakan reformasi kebudayaan di Arab Saudi oleh Muhammad bin Salman disebabkan oleh faktor-faktor idiosinkratisnya. Faktor-faktor ini meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman serta pembelajaran yang dialaminya sebagai seorang pemimpin yang dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosialnya, dan produksi pengetahuannya. Dengan latar belakang tersebut menjadikan Muhammad bin Salman sebagai seseorang yang tegas dan dominan sehingga mampu mempengaruhi orang-orang disekitarnya.

E. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengungkap alasan di balik keputusan Muhammad bin Salman dalam melakukan reformasi kebudayaan di Arab Saudi serta untuk memahami bentuk-bentuk kebijakan yang dihasilkan dari reformasi kebudayaan tersebut.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008). Penerapan teknik penelitian melibatkan sejumlah cabang ilmu, seperti sains sosial, ilmu alam, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Tujuannya adalah untuk mendukung peneliti dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi studi secara teratur. Dalam ranah penelitian akademis, teknik penelitian memfasilitasi pengujian hipotesis, menjawab pertanyaan penelitian, serta meraih pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang fenomena sosial dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara deskriptif (Purwanza, 2022). Dalam penelitian kualitatif, model data yang dikumpulkan mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam konteks ini, penelitian ini bergantung pada pengumpulan data sekunder, yang mengacu pada informasi yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda, namun digunakan oleh peneliti untuk keperluan studi mereka (Purwanza, 2022). Data dikumpulkan dengan melakukan penelitian literatur yang mencakup membaca berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel berita, dan dokumen resmi yang tersedia secara daring.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada analisis kebijakan Muhammad bin Salman dalam mendorong reformasi kebudayaan di Arab Saudi. Adapun pemilihan kebijakan Muhammad bin Salman dalam mendorong reformasi kebudayaan pada penelitian ini disebabkan kebijakan Muhammad bin Salman membawa perubahan kebudayaan Arab Saudi menjadi lebih modern. Berdasarkan kurun waktu, penulis mengambil rentang waktu dari tahun 2016 sampai dengan 2023. Pada tahun 2016, Muhammad bin Salman mengumumkan "Visi 2030" pertama kalinya untuk Arab Saudi. Salah satu fokus utamanya adalah melakukan reformasi dalam bidang kebudayaan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, disusun dalam empat bab yang masing-masing berisi pembahasan yang akan diuraikan secara rinci pada sub-bab. Setiap topik yang dibahas dalam setiap bab memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya, membentuk suatu karya tulis yang teratur dan terstruktur. Berikut adalah struktur penulisan yang dimaksud:

BAB I akan membahas mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan terkait kebijakan reformasi kebudayaan Arab Saudi yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman. Selanjutnya akan disertakan rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian serta sistematika penulisan. Latar belakang masalah berisikan mengenai bentuk dan sistem pemerintahan Arab Saudi, dinamika hubungan kerajaan

dengan kelompok wahabi, dampak adanya kelompok wahabi terhadap keberlangsungannya reformasi kebudayaan dalam Visi Saudi 2030, terpilihnya Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota dan perdana menteri, dan kebijakan Visi Saudi 2030 serta penolakan terhadap visi tersebut. Sub bab selanjutnya akan mempertanyakan alasan Muhammad bin Salman melakukan reformasi kebudayaan Arab Saudi dalam bingkai Visi Saudi 2030. Rumusan masalah tersebut diteliti lebih lanjut dengan menggunakan teori politik luar negeri, konsep reformasi budaya, dan konsep idiosinkratik. Sehingga menghasilkan hipotesis bahwa implementasi kebijakan Muhammad bin Salman terhadap reformasi kebudayaan di Arab Saudi disebabkan oleh faktor idiosinkratik Muhammad bin Salman yang dipengaruhi oleh latar pendidikan, pengalaman serta pembelajaran seorang pemimpin yang merupakan produk dari dinamika dalam kehidupan sosialnya, dan produksi pengetahuannya.

Sub bab tujuan penelitian mencantumkan tujuan dari penelitian ini, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang membuat Muhammad bin Salman melakukan reformasi kebudayaan Arab Saudi dan mengetahui bentuk dari reformasi kebudayaan tersebut. Kemudian, pada sub bab berikutnya, penulis menjelaskan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka dan analisis isi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, berita, dan dokumen resmi yang tersedia secara daring. Selain itu, pada sub bab jangkauan penelitian, penulis menegaskan bahwa penelitian ini berfokus pada periode tahun 2016-2023.

BAB II merupakan pembahasan elaborasi dari latar belakang masalah yaitu mengenai Dinamika Politik Arab Saudi. Dimulai dengan membahas bentuk negara dan sistem pemerintahan Arab Saudi, hubungan antara kerajaan dengan wahabi, deskripsi reformasi kebudayaan dalam bingkai Saudi Vision 2030, serta penentangan kelompok konservatif terhadap kebijakan reformasi kebudayaan dalam Visi Saudi 2030.

BAB III akan membahas terkait idiosinkratik Muhammad bin Salman dalam mewujudkan reformasi kebudayaan di Arab Saudi. Pembahasan berisi penjelasan terkait beberapa aspek yang mempengaruhi idiosinkratik atau gaya kepemimpinan Muhammad bin Salman.

BAB IV akan membahas mengenai penutup yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.